

BAB II

KAJIAN TEORITIK

Bab ini akan membicarakan tentang kerangka teoritik dari unsur-unsur data yang muncul dalam penelitian. Peneliti menggunakan karya Miriam Budiardjo, dalam partisipasi sukarela dan mobilisasi hanya dalam aspek prinsip, bukan kenyataan tindakan. Intinya baik sukarela ataupun dipaksa, warga negara tetap melakukan partisipasi politik, keterlibatan setiap individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam posisinya sebagai warga negara dengan kehendak suka rela dalam segala tahapan kebijakan dan mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan dalam mencapai cita-cita bangsanya.¹

Selain itu Paradigma Proses perspektif Donald V. Kurtz. Menurut Kurtz, paradigma proses ini perlu di munculkan karena²; *pertama*, untuk memberikan definisi dari politik tentang proses perhatian. *Kedua*, memberikan konsep dengan beberapa analisa politik dan kegiatan (partisipasi dalam sebuah proses). *Ketiga*, paradigma proses yang menepatkan konflik pada bagian awal analisa politik. *Keempat*, paradigma proses mengafkirkan struktur politik seperti pemerintahan dan garis keturunan sebagai pokok fokus pada analisa politik.

Disamping itu, peneliti juga akan membahas tentang konsep karakteristik, yang kemudian diterapkan dalam kultur budaya Madura secara

¹ Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1982), hal 43

² Donald V. Kurtz, *Political Anthropology; Paradigms and Power*, USA; West View Press, 2001, h.102-103

umum, dan masyarakat Desa Prajian secara khusus. Peneliti menggunakan karakteristik Karakter Orang Madura Dan Falsafah Politik Lokal perspektif Ainurrahman Hidayat. Karakter orang Madura ini perlu dimunculkan karena;³memberikan penjelasan tentang ketuhanan, mereka menepatkan identitas sebagai masyarakat dengan budayanya, memberikan konsep analisa sebagai pokok fokus pada analisa politik.

Peneliti kemudian menambahkan konsep kepala desa, yang meliputi landasan hukum dan pelaksanaan pelaksanaan dalam pemilihan kepala desa, juga tugas, wewenang, kewajiban, larangan, dan hak sebagai kepala desa.⁴

A. Konsep dan Teori partisipasi Politik Samuel P. Huntington dan Joan Nelson

Partisipasi politik secara harfiah berarti “keikutsertaan”, dalam konteks politik hal ini mengacu pada pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan setiap individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam posisinya sebagai warganegara dengan kehendak suka rela dalam segala tahapan kebijakan dan mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang

³Ainurrahman Hidayat, *Karakter Orang Madura Dan Falsafah Politik Loka*, Jurnal KARSA, Vol. 6 No. 6 April 2009. Hal 107

⁴Dhanish, *Indonesia: Mencegah Kekerasan dalam Pemilu Kepala Daerah*, Jurnal, Vol. 8 No.1 – 8 (Desember 2010). Hal 46

untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan dalam mencapai cita-cita bangsanya.⁵

Sedangkan Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam partisipasi sukarela dan mobilisasi hanya dalam aspek prinsip, bukan kenyataan tindakan. Intinya baik sukarela ataupun dipaksa, warganegara tetap melakukan partisipasi politik. Konsep partisipasi politik ini menjadi sangat penting dalam arus pemikiran deliberative democracy atau demokrasi musawarah. Pemikiran demokrasi musyawarah muncul antara lain terdorong oleh tingginya tingkat apatisisme politik di Barat yang terlihat dengan rendahnya tingkat pemilih. Besarnya kelompok yang tidak puas atau tidak merasa perlu terlibat dalam proses politik perwakilan menghawatirkan banyak pemikir Barat yang lalu datang dengan konsep deliberative democracy.⁶

Di Indonesia saat ini penggunaan kata partisipasi politik lebih sering mengacu pada dukungan yang diberikan warga untuk pelaksanaan keputusan yang sudah dibuat oleh para pemimpin politik dan pemerintahan. Misalnya ungkapan pemimpin "Saya mengharapkan partisipasi masyarakat untuk menghemat BBM dengan membatasi penggunaan listrik di rumah masing-masing". Sebaliknya jarang kita mendengar ungkapan yang menempatkan warga sebagai aktor utama pembuatan keputusan.

⁵ Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1982), hal 43

⁶ Campbell, Tom, *Tujuh Teori Sosial*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hal 63

a. Model Partisipasi Politik

Model partisipasi politik adalah tata cara orang melakukan partisipasi politik. Mode ini terbagi ke dalam 2 bagian besar: *pertama*, Conventional (menurut aturan) adalah mode klasik partisipasi politik seperti Pemilu dan kegiatan kampanye. mode partisipasi politik ini sudah cukup lama ada, tepatnya sejak tahun 1940-an dan 1950-an. *Unconventional* (diluar peraturan) adalah mode partisipasi politik yang tumbuh seiring munculkan Gerakan Sosial Baru.

Dalam gerakan sosial baru ini muncul gerakan pro lingkungan, gerakan perempuan gelombang 2, protes mahasiswa, dan terror.

Berikut ini adalah bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Almond secara konvensional:⁷

1. Pemberian suara (voting)
2. Diskusi politik
3. Kegiatan kampanye
4. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
5. Komunikasi individual dengan pejabat politik/administrative
6. Pengajuan petisi
7. Berdemonstrasi
8. Konfrontasi
9. Mogok
10. Tindak kekerasan politik terhadap harta benda: perusakan, pemboman, pembakaran.

⁷ Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hal 9.

Jika mode partisipasi politik bersumber pada faktor “kebiasaan” partisipasi politik di suatu zaman, maka bentuk partisipasi politik mengacu pada wujud nyata kegiatan politik tersebut. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi :⁸

- a. Terbentuknya organisasi-organisasi politik maupun organisasi masyarakat sebagai bagian dari kegiatan sosial, sekaligus sebagai penyalur aspirasi rakyat yang ikut menentukan kebijakan negara.
- b. Lahirnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai kontrol sosial maupun pemberi masukan (*input*) terhadap kebijakan pemerintah.
- c. Pelaksanaan pemilu yang memberi kesempatan kepada warga negara untuk dipilih atau memilih, misalnya berkampanye dan menjadi pemilih aktif.
- d. Munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna pada sistem input dan output kepada pemerintah, misalnya melalui unjuk rasa dan demonstrasi.
- e. Kegiatan Pemilihan – yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu.
- f. Lobby – yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu.

⁸ Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Op, Cit, hal 11*

- g. Kegiatan Organisasi – yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.
- h. Contacting – yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka, dan
- i. Tindakan Kekerasan (*violence*) – yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembunuhan politik (*assassination*), revolusi dan pemberontakan.

Bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson telah menjadi bentuk klasik dalam studi partisipasi politik. Keduanya tidak membedakan apakah tindakan individu atau kelompok di tiap bentuk partisipasi politik legal atau ilegal. Sebab itu, penyuapan, ancaman, pemerasan, dan sejenisnya di tiap bentuk partisipasi politik adalah masuk ke dalam kajian ini.

Dengan banyaknya individu menyaksikan acara televisi, utamanya berita-berita politik, mereka mengalami keterasingan politik. Keterasingan ini akibat melemahnya dukungan terhadap struktur-struktur politik yang ada di sistem politik seperti parlemen, kepresidenan, kehakiman, partai politik, dan lainnya. Individu merasa bahwa struktur-struktur tersebut dianggap tidak lagi memperhatikan kepentingan mereka. Wujud keterasingan ini muncul dalam bentuk sinisme politik berupa protes-protes, demonstrasi-demonstrasi, dan huru-hara. Jika

tingkat political disaffection tinggi, maka para individu atau kelompok cenderung memilih bentuk partisipasi yang sinis ini.

Sebab-sebab Timbulnya Gerakan Partisipasi Politik⁹

- a) Modernisasi
- b) Perubahan-perubahan Struktur Kelas Sosial
- c) Pengaruh Kaum Intelektual dan Komunikasi Massa Modern
- d) Konflik di antara Kelompok-kelompok Pemimpin Politik
- e) Keterlibatan Pemerintah yang Meluas dalam Urusan Sosial, Ekonomi, dan Kebudayaan.
- f) Rasa kepercayaan dan keyakinan terhadap pemerintah rendah maka partisipasi menjadi pasif.
- g) Rasa kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara dan juga kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka rasa partisipasi menjadi aktif.

Faktor-faktor Pendukung Partisipasi Politik

- (1) Pendidikan Politik
- (2) Kesadaran Politik
- (3) Budaya Politik

Menurut Gabriel Almond, budaya politik diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Budaya Politik Parokial (tingkat partisipasi politik yang sangat rendah)
- b. Budaya Politik Kaula (pada partisipasi politik ini, masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju, tapi masih bersifat pasif)

⁹ Mahfud, MD, Moh. *Demokrasi dan konstisusi di Indonesia*, (Jakarta : PT Asdi Mahasatya,2000), hal 46

- c. Budaya Politik Partisipan (budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi)

Ruang bagi partisipasi politik adalah sistem politik. Sistem politik memiliki pengaruh untuk menuai perbedaan dalam pola partisipasi politik warganegaranya. Pola partisipasi politik di negara dengan sistem politik Demokrasi Liberal tentu berbeda dengan di negara dengan sistem Komunis atau Otoritarian.¹⁰

b. Landasan Partisipasi Politik

Landasan partisipasi politik adalah asal-usul individu atau kelompok yang melakukan kegiatan partisipasi politik. Huntington dan Nelson membagi landasan partisipasi politik ini menjadi :

- 1) kelas – individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa.
- 2) kelompok atau komunal – individu-individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa.
- 3) lingkungan – individu-individu yang jarak tempat tinggal (domisilinya) berdekatan.
- 4) partai – individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan, dan golongan atau faksi – individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus antara satu sama lain, yang akhirnya membentuk

¹⁰ Mahfud, MD, Moh, *Op, Cit, hal 47*

hubungan patron-client, yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang tidak sederajat.¹¹

c. Political Efficacy

Political Efficacy adalah istilah yang mengacu kepada perasaan bahwa partisipasi politik seseorang dapat berdampak terhadap proses-proses politik. Keterlibatan individu atau kelompok dalam partisipasi politik tidak bersifat pasti atau permanen melainkan berubah-ubah. Dapat saja seseorang yang menggunakan hak-nya untuk memiliki di suatu periode, tidak menggunakan hak tersebut pada periode lainnya. Secara teroretis, ikut atau tidaknya individu atau kelompok ke dalam bentuk partisipasi politik bergantung pada Political Political Efficacy ini.

Pernyataan-pernyataan sehubungan dengan masalah Political Efficacy ini adalah :¹²

- i. “Saya berpikir bahwa para pejabat itu tidak cukup peduli dengan apa yang saya pikirkan.”
- ii. "Ikut mencoblos dalam Pemilu adalah satu-satunya cara bagaimana orang seperti saya ini bisa berkata sesuatu tentang bagaimana pemerintah itu bertindak.”
- iii. “Orang seperti saya tidak bisa bicara apa-apa tentang bagaimana pemerintah itu sebaiknya.”

¹¹ Ronald H Chilcote, *Teori Perbandingan Politik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003) hal 39

¹² *Ibid*, hal 40

- iv. “Kadang masalah politik dan pemerintahan terlalu rumit agar bisa dimengerti oleh orang seperti saya.”

Political efficacy terbagi 2 yaitu *external political efficacy* dan *internal political efficacy*. *External political efficacy* ditujukan kepada sistem politik, pemerintah, atau negara dan diwakili oleh pernyataan nomor 1 dan 3. Sementara *internal political efficacy* merupakan kemampuan politik yang dirasakan di dalam diri individu, yang diwakili pernyataan nomor 2 dan 4. Dari sisi stabilitas politik, sebagian peneliti ilmu politik menganggap bahwa stabilitas politik akan lahir jika tingkat *internal political efficacy* rendah dan tingkat *external political efficacy* tinggi.

Sehingga demikian, keikutsertaan individu dalam masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam mewujudkan kepentingan umum. Dan paling ditekankan dalam hal ini terutama sikap dan perilaku masyarakat dalam kegiatan politik yang ada. Dalam artian setiap individu harus menyadari peranan mereka dalam mendirikan kontribusi sebagai insan politik. Dalam hal ini peranan meliputi pemberian suara, kegiatan menghadiri kampanye serta aksi demonstrasi. Namun kegiatan-kegiatan sudah barang tentu harus dibarengi rasa sukarela sebagai kehendak spontanitas individu maupun kelompok masyarakat dalam partisipasi politik. Dengan kegiatan-kegiatan politik ini pula, intensitas daripada tingkat partisipasi politik warga masyarakat dapat termanifestasi. Oleh karena itu, sikap dan perilaku warga masyarakat dalam kegiatan politik berupa pemberian suara

dan kegiatan kampanye dalam pemilihan kepala daerah merupakan parameter dalam mengetahui tingkat kesadaran partisipasi politik warga masyarakat.¹³

Paling tidak warga masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik sekaligus mengambil bagian untuk mempengaruhi pemerintah dalam keputusan politik. Pemilihan kepala daerah sebagai wahana menyalurkan segala aspirasi masyarakat melalui suksesi dalam pemilihan kepala daerah, peran warga masyarakat terutama dalam mempengaruhi keputusan politik sangat prioritas. Dengan adanya pemilihan kepala daerah setiap individu maupun kelompok masyarakat dapat memmanifestasikan kehendak mereka secara sukarela, tanpa pengaruh dari siapapun. Dalam hal ini setiap anggota masyarakat secara langsung dapat memberikan suara dalam pemilihan serta aktif dalam menghadiri kegiatan-kegiatan politiknya, seperti kampanye.

Uraian yang dikemukakan tersebut dapat melahirkan suatu kesimpulan bahwa pemahaman nilai-nilai politik dalam masyarakat merupakan hal yang urgen dalam mewujudkan intensitas partisipasi politik warga masyarakat secara sukarela dan eksis dalam kegiatan-kegiatan politik. Partisipasi sebagai dimensi utama stratifikasi social, dia membagi partisipasi politik menjadi empat bagian yaitu:¹⁴

1. Pemimpin Politik

Pemimpin politik adalah pemegang kekuasaan yang memiliki legitimasi secara abash dari warga masyarakat. Pemimpin politik ini selalu memberikan perlindungan terhadap masyarakat sebagai objek kekuasaan.

¹³ Mahfud, MD, Moh, *Demokrasi dan konstisusi di Indonesia*. (Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2000), hal 43

¹⁴ *Ibid*, hal 37

2. Aktivist Politik

Aktivist politik adalah orang-orang yang selalu menghadiri setiap kegiatan politik

3. Komunikator

Komunikator adalah orang yang menerima dan menyampaikan ide, sikap dan informasi politik lainnya kepada orang lain.

4. Warga Negara

Warga negara adalah semua individu maupun kelompok yang turun serta dalam agenda politik.

B. Paradigma Proses dalam Antropologi Politik

Sebelum muncul paradigma proses, paradigma fungsional-struktural hadir lebih dulu dan mendominasi ilmu sosial-politik, khususnya era 1960an. Baru setelah dekade 60an, Swartz, Turner dan Tuden memperkenalkan pendekatan antropologi dalam ilmu politik, yang menekankan *agent-driven politics*. Dua tahun kemudian, Swartz (1968) mengembangkan pendekatannya dengan *local level politics*. Pendekatan inilah yang kemudian dijadikan landasan berpikir Donald V. Kurtz, seorang professor di bidang antropologi politik yang mengeluarkan paradigma proses.

Berkaitan dengan hal di atas, Widiastuti menambahkan, bahwa penekanan pada *local level politics* bukan tanpa alasan. Hal ini karena sangat berkaitan dengan budaya masyarakat. Berbicara masalah politik tentu tidak lepas dari pembicaraan masyarakat. Seperti halnya sebuah sistem, kiranya

politik adalah sebuah sistem yang disadari atau pun tidak telah merambah dalam pola pikir dan hidup masyarakat. Sistem yang berlaku dalam masyarakat tidak hanya berhenti pada sebuah titik tertentu, namun terhubung pada berbagai sub kehidupan yang saling melengkapi, memengaruhi dan memberikan daya satu sama lain. Dalam hal ini, budaya merupakan sub tema kehidupan yang telah menyatu dengan masyarakat.

Mengapa budaya? Melakukan aktifitas secara berulang dan men-tradisikan aktifitas bisa dibilang adalah budaya. Masyarakat, budaya, politik adalah satu kesatuan yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa antropologi adalah ilmu yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu bagian fenomena sosial dari manusia¹⁵. Suatu kajian ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang budaya satu kelompok masyarakat. Maka antropologi politik adalah suatu kajian yang memahami politik, pergerakan politik dari sudut pandang antropogi, termasuk didalamnya mengetahui proses keterlibatan unsur-unsur budaya dan tingkah laku masyarakat didalamnya, termasuk pelaku politik, cara-cara yang digunakan actor politik dan peran serta masyarakat dalam perpolitikan.

Dalam hal ini, antropologi politik menempati posisi sebagai bidang yang akan mengetahui akan struktur social politik, harga yang dikeluarkan untuk sebuah perpolitikan, dan bidang kajian yang mempelajari sistem politik. Antropologi bukanlah satu satunya ilmu yang mempelajari manusia. Ilmu-ilmu lain seperti ilmu Politik yang mempelajari kehidupan politik manusia,

¹⁵ Tuti Widiastuti, *Komunikasi Politik*, Jurnal, Vol. 10, No. 2 (Oktober 2007) Hal. 101

ilmu Ekonomi yang mempelajari ekonomi manusia atau ilmu Fisiologi yang mempelajari tubuh manusia dan masih banyak lagi ilmu-ilmu lain, juga mempelajari manusia berusaha menemukan kebiasaan-kebiasaan dan batas-batas yang masih layak dari cara berlaku yang telah menjadi kebiasaan.¹⁶Tetapi ilmu-ilmu ini tidak mempelajari atau melihat manusia secara menyeluruh atau dalam ilmu Antropologi disebut dengan Holistik, seperti yang dilakukan oleh Antropologi. Antropologi berusaha untuk melihat segala aspek dari diri makhluk manusia pada semua waktu dan di semua tempat, seperti: Apa yang secara umum dimiliki oleh semua manusia? Dalam hal apa saja mereka itu berbeda? Mengapa mereka bertingkah-laku seperti itu? Ini semua adalah beberapa contoh pertanyaan mendasar dalam studi-studi Antropologi.¹⁷

a. Konsep Paradigma Proses Donald V. Kurtz

Konsep – konsep paradigma proses menolak ide – ide fungsional yang berbentuk sosio-politik, memelihara aturan, dan bentuk sistem politik yang mendasari titik yang tepat dari antropologi politik. Meskipun paradigma proses menyediakan strategi – strategi untuk penelitian dan analisis dari pengendalian politik selama proses, baik antropologi politik maupun politik level lokal tidak merubah sepenuhnya paradigma fungsional.

Justru pelaksana proses mengenalkan ide-ide baru melalui para antropolog politik yang tidak suka dengan penafsiran fungsional dari politik

¹⁶ T.O. Ihromi, *Pokok-Pokok Antropologi Politik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2006). Hal 23

¹⁷ *Ibid*,28

yang menyumbangkan bagian bawah paradigma fungsional. Namun, beberapa ahli antropologi melanjutkan untuk mempertahankan pengembangan fungsional dari bentuk politik karena mereka menyediakan unit analisis yang rapi.¹⁸

Paradigma proses menyediakan para antropologi dengan perspektif baru dan beraneka ragam mengenai politik. Konsepnya meningkatkan banyaknya ide - ide politik biasanya dengan makna yang lebih mengerucut dan mendalam dari pada yang ada sebelumnya. Pengesahan, dukungan, golongan, kepemimpinan, konflik, kekuasaan dan isu-isu yang lain.

Konsep paradigma menggantikan dalam kata, jika tidak di pindahkan sinkronis tipologi dan fungsional berhubungan dengan bentuk politik, seperti garis keturunan dan pemerintahan. Dalam tempatnya, mereka menyerahkan metodologi yang mengembangkan politik-politik sebagai dinamis, pengendali proses yang berhubungan dengan membangun tim, formasi golongan, dan strategi yang memimpin perolehan kekuatan.¹⁹

Awal dari konseptualisasi marak dalam politik sebagai proses dilihatkannya dalam memasukkan dan melaksanakan tujuan umum dan dalam pencapaian perbedaan dan penggunaan kekuasaan oleh anggota kelompok yang bersangkutan. Dengan tujuan-tujuan tersebut.

Penekanan pada paradigma proses disini tidak lain adalah untuk meyakinkan bahwa bagaimana proses politik dan konflik sangat

¹⁸Donald V. Kurtz, *Political Anthropology; Paradigms and Power*, USA; West View Press, 2001, hal. 99

¹⁹*Ibid*, hal 104

mempengaruhi perubahan sistem politik. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa konseptualisasi dalam politik sebagai proses yang berkaitan dalam penentuan dan pelaksanaan tujuan politik atas hasil capaian yang berbeda-beda, tentunya sangat berkaitan dengan penggunaan kekuasaan (*power*) yang dilakukan oleh anggota masyarakat tertentu, dengan tujuan-tujuan tertentu pula.²⁰

Definisi di atas juga menunjukkan bahwasannya proses politik sarat dengan konflik. Sedangkan konflik itu sendiri bisa diselesaikan dengan penggunaan kemampuan dan kekuasaan (*power*) masing-masing kelompok. Oleh karenanya, paradigma proses berawal dari “terobosan” kondisi damai di dalam realitas sosial (baca; konflik) yang menghasilkan krisis sosial dan memaksa mobilisasi kekuatan besar untuk menerobos realitas sosial yang damai tersebut. Jika konflik berlanjut, maka akan memaksa agen untuk mengembangkan dan menyebarkan mekanisme perbaikan atas munculnya konflik tersebut. Pada akhirnya, secara perlahan, kondisi damai akan diwujudkan antara pihak-pihak yang berkonflik.²¹ Oleh karenanya, Kurtz pada akhirnya menekankan bahwa proses ini merupakan bagian dari penyelesaian masalah (*solution*) atas berbagai konflik yang terjadi setiap hari.

b. Kelemahan Proses

Paradigma proses bukan tanpa masalah, sebagai fungsionalisme yang implisit dalam “model dinamis” dari sosial drama. Beberapa konsep perubahan (dinamis) yang lain, seperti wilayah politik dan arena politik,

²⁰ Donald V. Kurtz, *Op. Cit. hal 105*

²¹ Donald V. Kurtz, *Op. Cit. hal 107*

begitu ambigu dan sulit untuk lapangan, diterapkan ide dari wilayah dan arena politik terdengar menarik, tetapi dalam praktek penerapannya penuh dengan kesulitan metodologi. Hal ini sangat sulit untuk menerapkan ide wilayah lapangan dan arena situasi institusional yang komplis, dimana level loka wilayah politik dan arena masyarakat modern melengkapi dengan level dan melebihi lain dari organisasi politik negara dan leve negara maju. Hari ini, jika ide ini digunakan secara keseluruhan, maka ide ini hanya akan berlaku sebagai hiasan dalam struktur yang sulit untuk objek struktur.²²

Dalam paradigma proses, pelajaran tentang studi faksi – faksi diharapkan menjadi pengantar kedalam ikatan dari tindakan politik dan konflik. Hal ini tidak terjadi, beberapa penulis, contohnya Bailey, menggunakan ide yang kupratif untuk menganalisa proses – proses politik yang bermacam – macam. Tetapi, meskipun ide atau gagasan Bailey tentang faksi – faksi sebagai sebuah kelompok , tanggapan tidak menjadi yang paling menarik perhatian dalam pemikiran para pakar antropologi politik.

Ada alasan – alasan, untuk hal ini. Dalam bagian ini, karena mengetahui macam macam dari faksi – faksi atau golongan – golongan ini, sebuah praktek fungsional menjadi lebih penting dari pada menyelidiki perubahan politik mereka.²³

²² Donald V. Kurtz, *Op. Cit.* hal 110

²³ Donald V. Kurtz, *Op. Cit.* hal 111

C. Karakteristik Orang Madura

a) Pandangan Ketuhanan

Dalam kumpulan puisi Nemor Kara, terdapat dua pandangan ketuhanan etnik Madura. Pandangan pertama menyiratkan bahwa Tuhan adalah penguasaan yang menguasai nasib manusia, sedangkan pandangan kedua menggambarkan bahwa Tuhan adalah penuntun ke jalan yang lurus.²⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “nasib” adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan atas diri seseorang; takdir. Dalam kumpulan puisi Nemor Kara, Tuhan digambarkan sebagai dzat yang menguasai nasib manusia. Puisi “Pello Koneng” karya Kadarisman secara tidak langsung mengandung harapan kepada Tuhan untuk mengubah nasibnya, karena Tuhan memiliki kuasa untuk mengubah nasib tersebut. Bali’na dhadhar pada puisi tersebut berasal dari sebuah ungkapan Madura *mandar badha’a li’-bali’na dhadhar* (semoga ada *bali’na dhadhar*). Hal itu berarti kutipan tersebut secara tidak langsung mengakui bahwa Tuhan merupakan penguasa/pengubah nasib manusia. Sebagai umat Islam dan menjadikan kitab suci (Al-Quran) sebagai pedoman hidup, masyarakat etnik Madura percaya pada Al-Quran surat Ar-Ra’d ayat 11 yang berbicara tentang Tuhan dan hubungannya dengan nasib manusia.²⁵

Ayat tersebut secara tegas menyatakan bahwa Tuhan adalah penguasa keadaan/nasib manusia. Manusia tidak akan dapat menghindar dari apa yang

²⁴Ainurrahman Hidayat, *Karakter Orang Madura Dan Falsafah Politik Loka*, Jurnal KARSA, Vol. 6 No. 6 April 2009. Hal 107

²⁵Al-Qur’an, (*Al-Fatihah:6—7*)

telah dikehendaki Tuhan. Namun, ayat tersebut juga menyatakan bahwa sebenarnya kuasa Tuhan juga bergantung dari usaha manusia itu sendiri. Penyair adalah individu yang memiliki keinginan untuk senantiasa hidup di jalan yang lurus. Mereka percaya bahwa dengan memegang teguh ajaran agama, mereka akan berada pada jalan yang benar, karena Tuhan akan menuntun mereka ke jalan itu. Kutipan puisi “Ngerrap Aba” karya Rozakki menyiratkan bahwa manusia memiliki potensi yang besar untuk berbuat dosa. Oleh karena itu, mereka memohon kepada Tuhan agar ketika mereka bekerja, mereka senantiasa berkejadengan jalan yang halal, bukan jalan yang haram.

Pandangan Tuhan sebagai penuntun ke jalan yang lurus adalah perwujudan dari doa yang setiap hari lima kali mereka lafazkan ketika salat. Doa tersebut terdapat dalam ayat yang berbunyi, “Tunjukilah kami jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka; bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat”. Bagi orang yang tidak menjalankan perintah agama, masyarakat Madura menyebutnya *edina pangeranna* (ditinggal tuhannya).²⁶

b) Pandangan Kemasyarakatan

Dalam kumpulan puisi *Nemor Kara*, etnik Madura memiliki pandangan kemasyarakatan. Pandangan kemasyarakatan tersebut antara lain: bangga akan identitas; tolong-menolong; dan kebersamaan dan persatuan. Berikut adalah paparannya. Puisi “*Maduraku, Budayaku dan Tumpah Darahku*” karya Abdul Jalal menyiratkan masyarakat Madura untuk

²⁶Moh. Mahfud & Al-Farouk, Ghazi. *Kosa Kata Basa Madura*. Surabaya: Sarana Ilmu. 1992. Hal 29

senantiasa bangga akan tanah kelahiran kekayaan seni budaya dan budaya sopan santun, tanah kelahiran merupakan tanah tumpah darah yang mesti diakui karena kemuliaannya serta merupakan tempat para pahlawan, orang yang berbudi pekerti luhur dan dekat dengan yang spiritual dan ilahiah.²⁷

Hal ini sesuai dengan ungkapan Madura, yaitu basa nantowagi bangsa(bahasa menentukan bangsa) yang bermakna keharusan untuk selalu mengakui dan bangga akan identitas yang melekat pada diri. Sebagai masyarakat yang komunal, etnik Madura tidak akan pernah absen dari budaya tolong-menolong antarsesama. Filsafat etnik Madura yang tertuang dalam peribahasarampa' naong baringin korong ditunjukkan kepada orang kaya yang gemar menolong yang lemah.

Bila Indonesia memiliki istilah gotong-royong dalam tolong-menolong untuk sebuah masyarakat, Madura sebagai salah satu etnik di Indonesia juga memiliki istilah song-osong lombung, jung-rojung, pak-opak eling se ekapajung untuk menolong antarsesama. Pak-opak eling memiliki makna tolong-menolong untuk mengingatkan mereka yang lupa (berbuat salah atau berperilaku tidak baik). Dengan demikian, bila budaya saling mengingatkan terjalin, akan tercipta masyarakat yang hidup sesuai dengan tuntunan hukum dan agama. Ungkapan Madura yang menunjukkan budaya tolong-menolong masyarakat etnik Madura antara lain berbunyi, mon bagus pabagas (kalau tampan harus gagah) yang bermakna seseorang yang rupawan

²⁷Mahrus Ali , *Akomodasi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura Mengenai Penyelesaian Carok Dalam Hukum Pidana*, Jurnal, No. 1 Vol. 17 (Januari 2010). Hal 24

harus memiliki semangat keberwiraan dengan berkorban untuk kepentingan masyarakat.²⁸

Dalam pandangan kebersaaan dan persatuan, etnik Madura percaya bahwa kebersamaan merupakan hal yang dapat membuat komunitas mereka bersatu. Kutipan puisi “Blibis Mole Karabana” karya Yayan K.S tersebut bercerita tentang seorang anak laki-laki yang pulang ke kampung halamannya (di Madura) setelah sekian lama merantau ke daerah lain. Hal ini menyiratkan pentingnya berkumpul bersama sanak keluarga di kampung halaman, karena kebersatuan dapat terwujud bila semua bagian dari komunitas berkumpul bersama. Kebersamaan antaranggota keluarga yang harus selalu dijaga tidaklah mengherankan bila melihat sistem kekerabatan di dalam etnik Madura.²⁹

Ikatan kekerabatan dalam masyarakat Madura terbentuk melalui keturunan-keturunan, baik dari keluarga berdasarkan garis ayah maupun garis ibu (*paternal and maternal relatives*). Dalam konsep kekerabatan tersebut, hubungan persaudaraan mencakup sampai empat generasi ke atas (*ascending generations*) dan ke bawah (*descending generations*). Oleh karena itu keutuhan keluarga besar merupakan sebuah keharusan dalam masyarakat etnik Madura.

Kebersatuan untuk menghindari perpecahan yang disebabkan oleh kekuatan asing tersebut bisa dilihat dari simbol pola pemukiman tradisional

²⁸Kuntowijoyo. *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris* (Yogyakarta: Matabangsa. 2002). Hal 52

²⁹*Ibid*, 16

masyarakat Madura. Pola pemukiman tradisional masyarakat Madura dikenal dengan sebutan kampong meji, konsekuensi sosial kampong meji yaitu solidaritas internal antarmasing-masing anggota atau penghuninya menjadi sangat kuat. Pagar rumpun bambun yang mengelilingi kampong meji bisa menjadi simbol tameng yang dapat menjaga persatuan dari perpecahan yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan asing.³⁰

c) **Pandangan Pribadi**

Dalam kehidupan sehari-hari, etnik Madura memiliki pandangan terhadap pribadi. Pandangan hidup etnik Madura terhadap pribadi dalam kumpulan puisi Nemor Kara antara lain: etos kerja; penjagaan diri dari perilaku buruk; dan penjunjungtinggian martabat. Dalam kumpulan puisi Nemor Kara, etnik Madura memiliki keyakinan bahwa untuk mencapai kesuksesan di dunia, setiap orang mesti bekerja keras. Puisi “Pello Koneng” karya Kadarisman memiliki makna bahwa manusia mesti bekerja keras untuk menyambung hidup yang serba tidak pasti. Hal itu sekaligus menunjukkan bahwa ketidakpastian hidup di dunia ini merupakan ujian bagi manusia. Ungkapan Madura abantal omba’ sapo’ angin (berbantal ombak berselimut angin berasal dari ungkapan Madura yang menunjukkan kerja keras yang tinggi demi mendapatkan apa yang dicapai.³¹

Dalam hidup ini manusia akan berhadapan dengan berbagai masalah. Oleh karena itu, manusia harus bersabar menghadapi masalah. Jika tidak,

³⁰Mulyana, Deddy., *Komunikasi Antar Budaya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006). Hal 43

³¹*Ibid*, 46.

manusia akan terjebak pada perilaku buruk. Masyarakat etnik Madura percaya bahwa setiap perilaku buruk dapat berdampak buruk. Amarah dapat menimbulkan perkelahian, sedangkan perkelahian akan berdampak pada keluarga, misalnya orang tua akan bersedih karena perkelahian tersebut. Puisi “Na’ Kana’ Ni’ Keni’ Ko’ Nongko’ Ta’ Akato” karya Meta Mega Silvia tersebut menyiratkan bahwa akan banyak kesedihan yang ditimbulkan oleh amarah. Kutipan Reng towa/ Asandadut e penggir labang’/Tampah cangkem, menunjukkan bahwa orang lain (orang tua) akan rugi (bersedih) karena carok (perilaku buruk).

Puisi “Peggel” karya Salamet Wahedi menunjukkan bahwa amarah dan carok dapat meninggalkan bekas yang buruk. Biasanya, akibat carok (sebagaimana kasus-kasus carok yang dipaparkan dalam buku Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura, menimbulkan dendam yang tak berkesudahan (lingkaran setan). Untuk mencapai kehidupan yang sempurna, masyarakat etnik Madura percaya bahwa manusia harus menjunjung tinggi martabat. Menjunjung tinggi martabat bisa dilakukan bila manusia juga melakukan hal-hal yang baik dan berperilaku yang baik.³²

Selain itu, untuk menjunjung tinggi martabat, manusia harus menghormati orang lain. Cara untuk menjunjung tinggi martabat yaitu dengan menjaga rasa malu dan harga diri melalui menjamu (menghormati) tamusebagaimana dalam puisi “Kampong Rokon” karya M. Helmy Prasetya. Memuliakan tamu yang merupakan perwujudan dari menghargai orang lain

³²Royyan Julian, *Pandangan Hidup Etnik Madura Dalam Kumpulan Puisi Nemor Kara*, Jurnal, Vol. 7 no. 3 (Junli 2006). Hal 5

merupakan kebiasaan orang Madura dan telah menjadi falsafah hidup dan adat mereka. Dalam hal ini adat (tradisi) adalah salah satu hal yang mesti dijaga sesuai dengan kerangka moral yang tertera di dalam buku Baburungan Becce'.³³

d) Pandangan Kealaman

Dalam kumpulan puisi Nemor Kara, etnik Madura memiliki beberapa pandangan tentang alam, antara lain: alam sebagai hiburan; alam sumber nafkah; dan alam berperilaku seperti manusia. Puisi “Pello Koneng” karya Kadarisman menunjukkan bahwa malam yang dihiasi bulan purnama dapat membuat manusia lapang dan sejuk. Kutipan *ate rassa tasengkap dan oreng-oreng acora' jembar* dalam puisi tersebut menunjukkan bahwa alam dapat membuat hati manusia menjadi lapang. Malam hari merupakan waktu ketika seseorang selesai bekerja. Dengan segala penat dan letih setelah bekerja, orang-orang yang digambarkan dalam puisi tersebut merasa lapang saat disuguhi bulan purnama yang baru saja terbit.

Dengan kondisi alam Madura yang panas, orang-orang Madura yang digambarkan dalam puisi tersebut menikmati udara malam hari yang dingin di luar rumahnya sambil tidur-tiduran, sedangkan anak-anak bermain petak umpet. Kebiasaan ini kerap dilakukan oleh masyarakat Madura pedesaan pada malam hari, duduk-duduk di atas balai-balai, bercengkerama dengan keluarga sambil menikmati camilan, kopi, dan rokok pada musim kemarau, yaitu ketika malam hari udara menjadi dingin dan bulan purnama menjadi

³³*Ibd*,47

sempurna. am kumpulan puisi Nemor Kara, alam juga dipercaya sebagai objek yang menjadi sumber nafkah bagi manusia. Di alamlah mereka bekerja untuk menyambung hidup.³⁴

Puisi “Madhura Dhika Sokmana Bula” karya Yayan K.S. menyiratkan bahwa garam yang berasal dari tanah pesisir menjadi sumber makanan bagi manusia, secara ekologis produksi garam adalah salah satu alternatif dari pertanian. Ketika keadaan cuaca tidak menguntungkan untuk pertanian, justru untuk produksi garam menguntungkan, begitu sebaliknya. Bahkan, saat ini pertanian garam menjadi mata pencaharian utama beberapa masyarakat di Madura. Alam sebagai sumber nafkah juga terdapat pada kutipan mebacca tana kerreng (membasahi tanah basah) dalam puisi “Pello Koneng” karya Kadarisman yang menunjukkan bahwa manusia membutuhkan tanah untuk bertani. Menurut De Jonge, 70% sampai 80% dari keseluruhan penduduk masih bergantung pada kegiatan-kegiatan agraris.³⁵

Aktivitas-aktivitas bidang pertanian tersebut tidak dapat berlangsung sepanjang tahun. Aktivitas menanam padi hanya dapat dilakukan pada musim hujan, sedangkan pada musim kemarau lahan-lahan pertanian biasanya ditanami ketela pohon, kacang-kacangan, kedelai, umbi-umbian, dan tembakau. Hal ini menunjukkan, seberapa pun kerasnya alam, orang-orang Madura masih membutuhkan alam sebagai sumber rejeki.³⁶

³⁴Rozaki, Abdur. *Menabur Kharisma Menuai Kuasa* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004). Hal 47

³⁵Royyan Julian, *Pandangan Hidup Etnik Madura Dalam Kumpulan Puisi Nemor Kara*, Jurnal, Vol. 7 No. 3. (Juli 2006). Hal 7

³⁶Srijanti, A. Rahman H.I, *Etika Berwarga Negara* (Jakarta: Selemba Empat, 2008). Hal 63

D. Konsep Pemilihan Kepala Desa

a. Pengertian dan Landasan Hukum Pilkades

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pemerintahan yang kewenangannya pada rakyat. Semua anggota masyarakat (yang memenuhi syarat) diikutsertakan dalam kehidupan kenegaraan dalam aktivitas pemilu. Demokrasi di negara Indonesia bersumberkan dari Pancasila dan UUD '45 sehingga sering disebut dengan demokrasi pancasila. Demokrasi Pancasila berintikan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan berpangkal tolak pada faham kekeluargaan dan kegotongroyongan. Berdasarkan pokok pikiran di atas tampak bahwa demokrasi terpimpin tidak bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945 serta budaya bangsa Indonesia.³⁷

Indonesia pertamakali dalam melaksanakan Pemilu pada akhir tahun 1955 yang diikuti oleh banyak partai ataupun perseorangan. Dan pada tahun 2004 telah dilaksanakan pemilu yang secara langsung untuk memilih wakil wakil rakyat serta presiden dan wakilnya. Dan sekarang ini Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2005 tentang desa telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa atau sering disebut pilkades langsung. Pilkades ini merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat.

³⁷Dhanish, *Indonesia: Mencegah Kekerasan dalam Pemilu Kepala Daerah*, Jurnal, Vol. 8 No.1 – 8 (Desember 2010). Hal 46

Dalam pasal 45 nomor 72 tahun 2005 tentang desa, penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 tahun tau pernah kawin mempunyai hak memilih.

Dan juga dalam pasal 46 nomor 72 tahun 2005 tentang desa,

1. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
2. Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan pencalonan dan tahap pemilihan.³⁸

b. Proses Pemilihan Kepala Desa

Di era reformasi dewasa ini, pemilihan kepala desa di seluruh Indonesia dipilih langsung oleh rakyat. Amandemen undang-undang pemilu langsung ini juga memiliki sisi positif dan negatif sekaligus. Rakyat memilih kepala desa masing masing secara langsung dan sesuai hati nurani masing masing. Dengan begini diharapkan kepala desa yang terpilih merupakan pilihan rakyat desatersebut. Dalam pelaksanaannya pilkades dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah masing masing. Tugas menjelang pelaksanaan pilkades yang dilaksanakan KPUD ini sangat berat yaitu mengatur

³⁸*Ibid*, 47

pelaksanaan pilkades ini agar dapat terlaksana dengan demokratis. Mulai dari seleksi bakal calon, persiapan kertas suara, hingga pelaksanaan pilkada ini.³⁹

Dalam proses pelaksanaannya selalu saja ada masalah yang timbul. Seringkali ditemukan pemakaian ijasah palsu oleh bakal calon. Dan juga biaya untuk menjadi calon yang tidak sedikit, jika tidak ikhlas ingin memimpin maka tindakan yang pertama adalah mencari cara bagaimana supaya uangnya dapat segera kemali atau “balik modal”. Ini sangat berbahaya sekali.

Dalam pelaksanaan pilkades ini pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Seringkali bagi pihak yang kalah tidak dapat menerima kekalahannya dengan lapang dada. Sehingga dia akan mengerahkan massanya untuk mendatangi KPUD setempat. Kasus kasus yang masih hangat yaitu pembakaran kantor KPUD salah satu provinsi di pulau sumatra. Hal ini membuktikan sangat rendahnya kesadaran politik masyarakat. Sehingga dari KPUD sebelum melaksanakan pemilihan umum, sering kali melakukan Ikrar siap menang dan siap kalah. Namun tetap saja timbul masalah masalah tersebut.

Pada Pasal 50 no 72 tahun 2005 tentang desa

1. Calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
2. Panitia pemilihan kepala desa melaporkan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.

³⁹Agus R. Rahman, *Politik BBM*.Jurnal, Vol, 7 No. 1 (Oktober 2005). Hal 21

3. Calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputisan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan.
4. Calon kepala desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada bupati/walikota melalui camat untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih
5. Bupati/walikota menerbitkan keputusan bupati/walikota tentang pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih paling lama 15 hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

c. Tugas, Wewenang, Kewajiban, Larangan Dan Hak Kepala Desa⁴⁰

- 1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
 - b) Mengajukan rancangan peraturan desa
 - c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
 - d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
 - e) Membina kehidupan masyarakat desa

⁴⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Kepala Desa Pasal 30 Hal 13

- f) Membina perekonomian desa
- g) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- h) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
- g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa

- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Selain itu mengenai larangan bagi kepala desa telah diatur dalam Pasal 32 yang berbunyi Kepala Desa dilarang:

- 1. Menjadi pengurus partai politik
- 2. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan
- 3. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD
- 4. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah
- 5. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain
- 6. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
- 7. Menyalahgunakan wewenang
- 8. Melanggar sumpah/janji jabatan.